



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARULIAN LUMBANTORUAN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 15267

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.545.000.000

1. Tanah Seluas 427 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/137 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/38 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m2 di HUMBANG HASUNDUTAN, WARISAN Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 335.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 250.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.180.100.000

III. HUTANG

Rp. 120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.060.100.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.